

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amelia, Tina. (2025). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Terstruktur untuk Penelitian dan Analisis Hukum*. Bogor: PT. Karya Ilmu Bermanfaat. Anwar, Syaiful. (2022). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Bali: CV. Green Publisher Indonesia.
- Barkah, Andriyani. (2024). *Perlindungan Hukum*. Palembang. CV. Doki Course and Training.
- Candra, Andi. (2024). *Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Chotidjah, E., dan Agus, A. P. (2022). *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Fachriah. (2025). *Hukum Lembaga Keuangan*. Riau: CV. Ekdanta Press.
- Farhana. (2022). *Pendekatan Hukum Responsif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: CV. Assofa.
- Ibrahim, M. B. (2023). *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan (Panduan & Referensi)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- M, Nawir. (2024). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Makassar: CV. Idebuku.
- Puspita, Diah. (2025). *Metode Penelitian Hukum*. India: Edu Gorilla Community Pvt. Ltd.
- Putra, Adhansyah., dan Saraswati, D. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: Jakad Media Publishing.

Rizkia, N. D., dan Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Bandung: Widina Media Utama.

Susanti, D. O., dan Efendi, A. (2020). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, Adrian. (2023). *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Naskah Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 75, 1959).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5253).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Nasabah di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6788).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24/POJK.03/2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 163).

C. JURNAL

- Anggraini, A., Sengaji, A. M., Adzani, M. R., & Amanah, S. (2026). Limitasi Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Tindakan Pemblokiran Rekening: Tinjauan Yuridis atas Hak Penguasaan Dana Nasabah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4(3), 945-954. DOI: <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5367>
- Ansyah, R. (2024). Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Mediasi Di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 5(02). 142-158. DOI: <http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v5i02.13442>
- Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya* 1(1). 21-30. DOI: <https://doi.org/10.37637/kw.v1i1.419>
- Astuti, A. W., & Safitri, W. (2020). Kajian Hukum Atas Hubungan Antara Nasabah Dan Bank Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum* 12 (1), 1-10.
- Badawi, G. O., Rahmanda, B., & Prananingtyas, P. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Pemblokiran Rekening oleh Bank Secara Sepihak (Studi Kasus Putusan Nomor 112/PDT. G/2022/PN YYK). *Diponegoro Law Journal* 14(3). 1-18. DOI: <https://doi.org/10.14710/dlj.2025.51883>
- Damayanti, A. N., Pamungkas, Z. B., & Lestari, T. I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Jasa Perbankan. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi* (Vol. 3, No. 1, pp. 487-496).
- Dewi, N. M. T., & Manika, A. S. (2023). Peranan Perbankan Dalam Upaya Membantu Tugas Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Mencegah Terjadinya Pencucian Uang. *Kerta Dyatmika* 20(2), 35-47. DOI: <https://doi.org/10.46650/kd.v20i2.1427>

- Fahrial, F. (2018). Peranan bank dalam pembangunan ekonomi nasional. *Ensiklopedia of Journal*. 179-184.
- Fitri, K., & Yulianti, R. (2012). Tinjauan Faktor Penyebab Dormant Account (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru). *Jurnal Ekonomi* 20(04). 1-17.
- Hapsoro, S. W., & Sukresna, I. M. (2023). Pengaruh Rekening Dormant Dan Digital Marketing Terhadap Minat Menabung Kembali Dengan Mediasi Kepercayaan Nasabah (Studi Pada Nasabah Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pati). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 23(2), 47-56.
- Kartika, Y., Djaja, B., & Sudirman, M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Rekening Nasabah yang Otomatis Berstatus Dormant pada Sistem Perbankan. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 3 (2), 1-8. DOI: <https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i1.4964>
- Manurung, Rahmadani. (2026). Aspek Hukum Pemblokiran Rekening Pasif/Rekening Dormant Berdasarkan Asas Kerahasiaan (Confidential Principle) Dalam Lembaga Perbankan yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 3 (1), 53-63. DOI: <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v3i1.7901>
- Ngiu, S. F. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Subjek Hukum Menurut Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Lex Privatum* 3(1), 240-248.
- Nurhidayani, N., Kurniawan, K., & Muhaimin, M. (2026). Tinjauan Hukum Pemblokiran Rekening Bank Dormant Oleh PPAK Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Education and Development* 14(2), 784-790. DOI: <https://doi.org/10.37081/ed.v14i2.8226>
- Nurmawati, D., Firnanda, H. D., Ikhsanullah, M., & Harimurti, Y. W. (2025). Analisis Hukum Terhadap Wewenang PPAK: Studi Kasus Pemblokiran Rekening Oleh PPAK. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3(6), 8128-8138. DOI: <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2474>

- Nuzan, N. D., Situmorang, F. N., & Geraldi, K. D. (2024). Menelaah lebih dalam perbedaan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. *Jurnal Kewarganegaraan* 8(1), 860-866. DOI: <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6418>
- Oktavianingrum, F. N., & Bupu, M. I. R. (2026). Analisa hukum kewenangan PPATK terhadap kebijakan pemblokiran rekening dormant ditinjau dari prinsip fiduciary duty dalam hubungan bank dan nasabah. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 19(02), 1-9. DOI: <https://doi.org/10.59582/sh.v19i02.1492>
- Pringgar, R. F., & Sujatmiko, B. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) modul pembelajaran berbasis augmented reality pada pembelajaran siswa. *IT-Edu: Jurnal Information Technology and Education* 5(1), 317-329. DOI: <https://doi.org/10.26740/it-edu.v5i1.37489>
- Ramadhan, S. R., & Alfath, T. P. (2026). Tanggung Gugat atas Tindakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang Melakukan Pemblokiran Rekening Dormant Nasabah Perbankan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2(1), 40-51. DOI: <https://doi.org/10.63822/55mwgr18>
- Sitompul, Z. (2005). Peran dan Fungsi Bank Dalam Sistem Perekonomian. *Majalah Pilar* No19, 10-16.
- Suci, I. K., & Budiharto, S. N. L. (2017). Tanggung Jawab Bank Terhadap Pemblokiran Uang Dalam Rekening Nasabah Secara Sepihak (Kasus: Putusan No. 638/PDT. G/2011/PN. JKT. SEL). *Diponegoro Law Journal* 6(2), 1-11. DOI: <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17226>
- Susilo, F. C. A., Laksita, A. S. H., Siahaan, D. M., & Zahra, A. M. A. (2026). Sengketa Penutupan Rekening Dormant Secara Sepihak Oleh Bank: Analisis Yuridis Dan Perlindungan Hukum Nasabah. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3(2), 119-139. DOI: <https://doi.org/10.71153/wathan.v3i2.508>

Syukron, S. (2022). Peran OJK dalam Melindungi Nasabah dan Masyarakat di Sector Jasa Keuangan. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 8(2), 190-201. DOI:

<https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v8i2.5979>

Tirtawijaya, Y. K., & Wagiman, W. (2023). Analisis Penguatan Sistem Perbankan Digital Di Indonesia Berdasarkan Asas-Asas Perbankan. *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 23(1), 172-186. DOI:

<https://doi.org/10.35965/eco.v23i1.2493>

Wuisang, Julio. (2026). Perlindungan Perlindungan Hukum Nasabah Bank Atas Pemblokiran Rekening Dormant Berdasarkan Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 14 (5), 1-13.

Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal* 2(2), 114-123.

D. LAIN-LAIN

Buana, H. (2023). Tanggung Jawab Bank dalam Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian pada Pemblokiran Rekening Nasabah Salah Sasaran (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

CNBC Indonesia. "Lengkap! 9 Fakta Aksi Blokir Rekening Dormant oleh PPAATK." CNBC Indonesia, 27 April 2026.

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20250807162515-17-656088/lengkap-9-fakta-aksi-blokir-rekening-dormant-oleh-ppatk>.

CNN Indonesia. "OJK Minta Bank Tak Asal Blokir Rekening Nganggur Kecuali 2 Kondisi." CNN Indonesia, 21 Juli 2026.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250904115230-78-1270060/ojk-minta-bank-tak-asal-blokir-rekening-nganggur-kecuali-2-kondisi>.

Detik finance. "OJK Minta Bank Tak Sembarang Blokir Rekening Kecuali Terindikasi Pidana". Detik finance, 21 Juli 2026.

<https://finance.detik.com/moneter/d-8095839/ojk-minta-bank-tak-sembarangan-blokir-rekening-kecuali-terindikasi-pidana>.

Info Bank Institute. "Kebijakan PPATK Blokir Rekening Dormant Merusak Kepercayaan Publik ke Perbankan." Info Bank Institute, 5 November 2025. <https://www.infobankinstitute.com/News/kebijakan-ppatk-blokir-rekening-dormant-merusak-kepercayaan-publik-ke-perbankan.html>.

Kompas. "DPR Kritisi Pemblokiran Rekening Dormant Sebut Orang Simpan Uang di Bank Juga Atas Anjuran Pemerintah." Kompas, 21 Juli 2026. <https://money.kompas.com/read/2025/08/05/115457826/dpr-kritisi-pemblokiran-rekening-dormant-sebut-orang-simpan-uang-di-bank-juga>.

Kompas. "Heboh Rekening Dormant Diblokir OJK Bakal Revisi Aturannya." Kompas, 22 Oktober 2025. <https://money.kompas.com/read/2025/08/04/211257926/heboh-rekening-dormant-diblokir-ojk-bakal-revisi-aturannya>.

Kompas. "Rekening Ketua MUI Diblokir PPATK Berisi Uang 300 Juta." Kompas, 22 Juli 2026. <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/11/12074341/rekening-ketua-mui-diblokir-ppatk-berisi-uang-yayasan-rp-300-juta>.

Kumparan Bisnis. "Cerita Warga Rekeningnya Diblokir PPATK: Tak Bisa Bayar Operasi-Usaha Terganggu." Kumparan Bisnis, 11 November 2025. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/cerita-warga-rekeningnya-diblokir-ppatk-tak-bisa-bayar-operasi-usaha-terganggu-25Z3z5rG83x/4>.

Kumparan. "Cerita Warga Rekeningnya Diblokir PPATK: Tak Bisa Bayar Operasi-Usaha Terganggu." Tempo, 22 Juli 2026. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/cerita-warga-rekeningnya-diblokir-ppatk-tak-bisa-bayar-operasi-usaha-terganggu-25Z3z5rG83x/4>.

Pratiwiningtyas, Nur Aini. (2020). Kepastian Hukum Pemblokiran Rekening oleh Pihak Bank Terhadap Nasabah Secara Sepihak. (Undergraduate Thesis, Universitas Jember).

Tempo. "Cara Mengaktifkan Rekening Dormant". Tempo, 5 Mei 2026.
<https://www.tempo.co/ekonomi/cara-mengaktifkan-rekening-dormant-1543872>.

Warta Ekonomi. "OJK Siapkan Aturan Baru untuk Pengelolaan Rekening Dormant." Warta Ekonomi, 22 Oktober 2025.
<https://wartaekonomi.co.id/read580126/ojk-siapkan-aturan-baru-untuk-pengelolaan-rekening-dormant>.